



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 20 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA DAN FORMULASI PERHITUNGAN TARIF BATAS ATAS
PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI
ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu diatur ketentuan mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 817);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1823);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1212);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA DAN FORMULASI PERHITUNGAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri adalah harga jasa pada suatu rute tertentu di dalam negeri atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.
2. Tarif Dasar adalah besaran tarif per penumpang kilometer yang dinyatakan dalam rupiah.
3. Tarif Jarak adalah besaran tarif per rute penerbangan per satu kali penerbangan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara Tarif Dasar dengan jarak.
4. Biaya adalah nilai uang atas kegiatan baik berupa pengeluaran maupun bukan pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan hasil produksi.
5. Tarif Batas Atas adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dari Tarif Jarak yang ditetapkan.
6. Pajak adalah pajak pertambahan nilai (PPn) yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
7. Iuran Wajib Asuransi adalah asuransi pertanggung jawaban kecelakaan penumpang yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang.
8. Biaya Tuslah/Tambahan (*Surcharge*) adalah biaya yang dikenakan karena terdapat biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan udara di luar perhitungan penetapan Tarif Jarak.
9. Jarak adalah rata-rata jarak terbang pesawat udara dalam kilometer pada suatu rute penerbangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

10. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau *Pasenger Service Charge (PSC)* adalah tarif pelayanan jasa penumpang di bandar udara, yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau badan usaha bandar udara setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri.
11. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
12. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal adalah badan usaha angkutan udara yang telah memiliki izin usaha angkutan udara niaga berjadwal.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dihitung berdasarkan komponen:

- a. Tarif Jarak;
- b. Pajak;
- c. Iuran Wajib Asuransi; dan
- d. Biaya Tuslah/Tambahan (*Surcharge*).

Pasal 3

- (1) Komponen tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dibedakan atas tarif angkutan udara yang menggunakan:

- a. pesawat udara jenis propeller; atau
 - b. pesawat udara jenis jet.
- (2) Tarif angkutan udara yang menggunakan pesawat udara jenis propeller sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibedakan berdasarkan kapasitas tempat duduk sesuai dengan *Alocation Seats Configuration (ASC)* standar pabrikan pesawat udara, yang terdiri atas:
- a. kurang atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk; atau
 - b. lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk.

Pasal 4

- (1) Besaran tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan batas atas tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.
- (2) Tarif batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan berdasarkan kelompok pelayanan yang diberikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal.
- (3) Besaran tarif berdasarkan kelompok pelayanan untuk Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. penerapan tarif 100% (seratus persen) dari tarif maksimum yang memberikan pelayanan dengan standar maksimum (*full services*);
 - b. penerapan tarif setinggi-tingginya 90% (sembilan puluh persen) dari tarif maksimum, untuk pelayanan dengan standar menengah (*medium services*); dan
 - c. penerapan tarif setinggi-tingginya 85% (delapan puluh lima persen) dari tarif maksimum, untuk pelayanan dengan standar minimum (*no frills services*).

Pasal 5

- (1) Komponen pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan.
- (2) Komponen iuran wajib asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan mengenai iuran wajib asuransi.
- (3) Komponen biaya tuslah/tambahan (*surcharge*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, ditetapkan oleh Menteri melalui Keputusan Menteri atau melalui persetujuan Menteri.

Pasal 6

Komponen biaya tuslah/tambahan (*surcharge*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dikenakan dalam hal adanya kondisi:

- a. fluktuasi harga bahan bakar (*fuel surcharge*);
- b. biaya yang ditanggung oleh perusahaan angkutan udara pada saat hari raya; atau
- c. biaya yang dibebankan kepada penumpang yang disebabkan adanya pelayanan tambahan yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara.

Pasal 7

Biaya tuslah/tambahan (*surcharge*) yang disebabkan adanya fluktuasi harga bahan bakar (*fuel surcharge*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dikenakan dalam hal terjadi kenaikan harga bahan bakar dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut yang mengakibatkan kenaikan biaya operasi pesawat di atas 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

Biaya tuslah/tambahan (*surcharge*) yang disebabkan adanya kondisi biaya yang ditanggung oleh perusahaan angkutan udara pada saat hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat dikenakan dalam hal adanya kondisi yang menyebabkan adanya biaya yang ditanggung oleh

perusahaan angkutan udara karena pada saat berangkat atau pulang penerbangan tanpa penumpang, misalnya pada saat hari raya.

Pasal 9

Biaya tuslah/tambahan (*surcharge*) yang disebabkan adanya biaya yang dibebankan kepada penumpang yang disebabkan adanya pelayanan tambahan oleh badan usaha angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dikenakan dengan ketentuan:

- a. pelayanan penumpang sebelum, selama, dan sesudah penerbangan;
- b. manfaat perlindungan asuransi; dan/atau
- c. bentuk pelayanan tambahan lainnya.

Pasal 10

- (1) Selain penghitungan berdasarkan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan batas atas tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dengan pertimbangan:
 - a. kemampuan pengoperasian bandar udara; dan
 - b. kapasitas pesawat udara untuk maksimal penumpang diangkut.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. proses melalui usulan dari badan usaha angkutan udara/ *stakeholder*, atau
 - b. pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berdasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Tarif Batas Atas ditetapkan oleh Menteri dengan Keputusan Menteri tersendiri setelah berkoordinasi dengan asosiasi penerbangan nasional dengan

mempertimbangkan masukan dari asosiasi pengguna jasa penerbangan.

- (2) Berdasarkan Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan usaha Angkutan Niaga menetapkan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi pada rute yang dilayani setelah mendapatkan persetujuan izin rute.

Pasal 12

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal wajib memberlakukan harga jual tiket untuk penumpang:
 - a. bayi (*infant*) berusia kurang dari 2 (dua) tahun sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif dewasa pendamping bayi (*infant*); dan
 - b. veteran perang dengan tarif tertentu berdasarkan kebijakan badan usaha angkutan udara dengan menunjukkan kartu tanda anggota bersangkutan.
- (2) Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dapat menetapkan harga jual tiket untuk tandu (*stretcher*) paling tinggi 900% (sembilan ratus persen) dari tarif batas atas per penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

Pasal 13

Apabila terdapat rute baru dan besaran tarifnya belum ditetapkan oleh Menteri, Direktur Jenderal untuk sementara dapat menetapkan tarif dengan formula perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

FORMULA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 14

- (1) Tarif Jarak merupakan hasil perkalian antara Tarif Dasar dengan jarak.

- (2) Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan biaya operasi pesawat udara yang terdiri dari biaya pokok per satuan unit produksi ditambah keuntungan.
- (3) Biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari komponen biaya, yaitu:
 - a. biaya langsung; dan
 - b. biaya tidak langsung.

Pasal 15

- (1) Biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. biaya operasi langsung tetap; dan
 - b. biaya operasi langsung variable.
- (2) Biaya operasi langsung tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan biaya yang terjadi atau timbul sebagai akibat dari aktivitas pesawat udara baik yang beroperasi maupun yang tidak beroperasi, meliputi:
 - a. biaya penyusutan atau sewa pesawat;
 - b. biaya asuransi;
 - c. biaya gaji tetap crew;
 - d. biaya gaji tetap teknisi; dan
 - e. biaya crew dan teknisi training.
- (3) Biaya operasi langsung variable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang terjadi atau timbul sebagai akibat dari aktivitas pengoperasian pesawat udara, meliputi:
 - a. biaya pelumas;
 - b. biaya bahan bakar minyak;
 - c. biaya tunjangan crew;
 - d. biaya overhaul atau pemeliharaan;
 - e. biaya jasa kebandarudaraan;
 - f. biaya jasa navigasi penerbangan;
 - g. biaya jasa ground handling penerbangan; dan
 - h. biaya katering penerbangan.

Pasal 16

Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, merupakan biaya yang terjadi atau timbul untuk menunjang kegiatan badan usaha angkutan udara niaga yang tidak berhubungan atau berkaitan secara langsung dengan operasional pesawat udara, yang terdiri atas:

- a. biaya organisasi; dan
- b. biaya pemasaran atau penjualan.

Pasal 17

Rincian cara perhitungan biaya operasi pesawat udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 18

Perhitungan Tarif Dasar didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. perhitungan biaya pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), merupakan total biaya operasi pesawat udara berdasarkan biaya penuh (*full costing*) termasuk tingkat keuntungan (*margin*) yang wajar;
- b. data komponen biaya yang digunakan dalam perhitungan merupakan data biaya operasi pesawat udara badan usaha angkutan udara pada saat penyusunan tarif atau sumber data lainnya dengan memperhatikan tingkat akurasi, kewajaran, dan efisiensi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. perhitungan biaya operasi pesawat udara sebagai dasar penetapan Tarif Dasar dan Tarif Jarak yang merupakan biaya operasi pesawat udara paling efisien dan atau populasi yang terbanyak yang dioperasikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal;
- d. pembebanan biaya operasi pesawat udara dalam perhitungan Tarif Dasar angkutan udara penumpang kelas ekonomi dengan menggunakan pesawat jet ditetapkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen)

- dan pesawat propeller ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari total biaya operasi; dan
- e. biaya per unit (*cost per unit*) yaitu biaya per penumpang yang diperoleh dari biaya total operasi pesawat udara dengan faktor muat sebesar 65% (enam puluh lima persen) untuk pesawat jet dan 70% (tujuh puluh persen) untuk pesawat propeller.

BAB IV MEKANISME PENETAPAN TARIF

Pasal 19

- (1) Tarif batas atas ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal yang disertai dengan:
- a. perhitungan biaya operasi pesawat udara; dan
 - b. justifikasi perhitungan Tarif Dasar dan/atau Tarif Jarak.
- (2) Dalam melakukan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyusun dan melakukan evaluasi besaran tarif batas atas dengan melibatkan unit kerja terkait.

Pasal 20

- (1) Tarif batas atas yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 baik baru maupun perubahan harus dipublikasikan dengan ketentuan:
- a. publikasi yang dilakukan oleh Menteri dilakukan melalui website Kementerian Perhubungan; dan
 - b. publikasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal kepada konsumen paling sedikit melalui media cetak dan elektronik dan/atau dipasang pada setiap tempat penjualan tiket pesawat udara dan bandar udara.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tarif batas atas ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Pengenaan biaya tuslah/tambahan (*surcharge*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengenaan biaya tuslah/tambahan (*surcharge*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. Asosiasi Penerbangan Sipil Indonesia; dan/atau
 - b. Badan Usaha Angkutan Udara.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum rencana penerapan biaya tuslah/tambahan (*surcharge*); dan
 - b. menyampaikan analisa mengenai rencana rute pelaksanaan, perhitungan besaran tambahan biaya, dan pergerakan penumpang sesuai rute yang direncanakan.

Pasal 22

- (1) Pengenaan biaya tuslah/tambahan (*surcharge*) yang disebabkan adanya biaya yang dibebankan kepada penumpang yang disebabkan adanya pelayanan tambahan yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan pelayanan tambahan dengan sifat alternatif pilihan oleh penumpang.
- (2) Pengenaan biaya tambahan dapat dikenakan setelah mendapat persetujuan oleh Menteri.
- (3) Pengajuan biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal kepada Direktur Jenderal.
- (4) Pengajuan biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit melampirkan:
 - a. surat permohonan secara tertulis;
 - b. jenis pelayanan tambahan;
 - c. proses pelayanan tambahan;

- d. manfaat pelayanan tambahan bagi penumpang; dan
 - e. rencana kerjasama dengan pihak-pihak terkait.
- (5) Dalam hal biaya tambahan yang dikenakan berupa pelayanan tambahan jasa asuransi, maka harus disertai dengan data dukung terkait dengan jenis perlindungan asuransi dan proses klaim asuransi selain yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

BAB V

EVALUASI TARIF PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI

Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap besaran tarif yang telah ditetapkan dengan ketentuan:
- a. dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - b. sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan signifikan yang mempengaruhi kelangsungan kegiatan badan usaha angkutan udara.
- (2) Perubahan signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perubahan yang menyebabkan terjadinya kenaikan total biaya operasi pesawat udara hingga paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebabkan adanya perubahan:
- a. harga avtur;
 - b. harga nilai tukar rupiah; dan
 - c. harga komponen biaya lainnya.

Pasal 24

Hasil evaluasi Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan dasar perubahan atas tarif batas atas yang telah ditetapkan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. pengawasan Direktorat Angkutan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara;
 - b. laporan dari penyelenggara bandar udara;
 - c. media elektronik dan media masa;
 - d. laporan masyarakat/pengguna jasa;
 - e. harga yang tercantum di dalam tiket, penjualan secara *online* (elektronik) dan/atau bukti pembayaran lain yang dipersamakan; atau
 - f. pemberitaan agen (*agent news*).

Pasal 26

Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam menetapkan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus mencantumkan:

- a. perincian komponen tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri di dalam tiket; dan
- b. besaran biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau *Passenger Service Charge* (PSC) di dalam tiket.

Pasal 27

Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal bertanggung jawab terhadap besaran tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi yang dilakukan sendiri atau oleh mitra penjualan tiket.

Pasal 28

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri mengenai Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Penerbangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Menteri dapat mengatur besaran tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan berfungsi sebagai alat pengawasan dan evaluasi pengenaan tarif oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal.
- (2) Tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan harga jasa terendah atau minimum yang diizinkan diberlakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal.

Pasal 30

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dengan pertimbangan paling sedikit:
 - a. perlindungan konsumen; dan
 - b. perlindungan dari persaingan tidak sehat;
- (2) Pertimbangan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada aspek keselamatan dan keamanan di bidang penerbangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 347

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM,



WAHJU AJI HERPRIARSONO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 20 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA DAN FORMULASI PERHITUNGAN
TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN
KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA
BERJADWAL DALAM NEGERI

RINCIAN CARA PERHITUNGAN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA

KARAKTERISTIK PESAWAT

1. Jenis Pesawat (Jet / Non Jet)	=	
2. Tipe Pesawat (Tipe pesawat yang dioperasikan untuk penerbangan)	=	
3. Tahun Pembuatan Pesawat (Jika di dalam operasinya Operator menggunakan lebih dari satu pesawat, maka untuk perhitungan tahun pembuatan dapat digunakan rata-rata tertimbang)	=	
4. Tahun Pembelian/Perolehan (Jika di dalam operasinya Operator menggunakan lebih dari satu pesawat, maka untuk perhitungan tahun pembelian perolehan dapat digunakan rata-rata tertimbang)	=	
5. Jumlah seluruh tipe pesawat yang dimiliki (Jumlah seluruh tipe pesawat baik jet/non jet yang dioperasikan baik untuk komersial/perintis)	=	buah
6. Jam Terbang Per Tahun untuk 1 pesawat (utilisasi / penggunaan rata-rata setiap pesawat untuk komersial dan perintis)	=	jam
7. Jam terbang per tahun secara total (utilisasi/penggunaan seluruh pesawat yang dimiliki baik untuk komersial maupun perintis)	=	jam
8. Payload per pesawat	=	Kg
9. Kapasitas Pesawat		
a. Penumpang	=	Orang
b. Barang / kargo	=	Kg

10. Satuan Unit Produksi Km per tahun (satuan unit x jarak terbang)	=	Satuan Unit Produksi-km
11. Tingkat Isian Penumpang ("Load Factor")	=	%
12. Nilai Tukar "Rupiah" terhadap "Dollar Amerika Serikat"	=	Rp
13. Jumlah Pemakaian BBM "AVTUR" - Per Jam Terbang	=	liter
14. Harga BBM Pesawat "AVTUR " - Per Liter	=	Rp
15. Tambahan Taxi in/out	=	Rp
16. Maximum Take- off Weight	=	Rp

RINCIAN CARA PERHITUNGAN KOMPONEN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA

No.	KOMPONEN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA
I.	BIAYA OPERASI LANGSUNG
A.	BIAYA BIAYA OPERASI LANGSUNG TETAP
	1.a. BIAYA PENYUSUTAN
	a. PENYUSUTAN PESAWAT UDARA
	1) Harga pesawat dalam US \$
	Harga pesawat dapat diasumsikan atas dasar :
	- nilai perolehan pesawat udara, atau
	- harga pasar pesawat udara saat ini, atau
	- harga pesawat udara hasil reevaluasi, atau
	- harga pesawat udara berdasarkan nilai buku.
	2) Nilai Konversi rupiah per US \$
	prakiraan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.
	3) Harga pesawat dalam rupiah
	Harga pesawat dalam US\$. dikalikan dengan nilai konversi rupiah
	terhadap dollar atau (1 x 2).
	4) Umur ekonomis
	Batas umur prakiraan pesawat dapat dioperasikan secara ekonomis
	/ masa penyusutan :
	- masa penyusutan untuk pesawat baru 15 tahun
	- masa penyusutan untuk pesawat lama 10 tahun
	- untuk pesawat udara yang telah disusut habis (dibeli lebih dari
	15 tahun), harus dilakukan reevaluasi guna mengetahui nilai
	buku pesawat udara.
	5) Biaya penyusutan pertahun
	$\frac{3) - \text{nilai residu}}{4)}$
	nilai residu = harga pesawat x 10 %.
	6) Biaya Penyusutan Pesawat Per Jam-KM
	$\frac{\text{biaya penyusutan per tahun}}{\text{produksi pnp-km per tahun}}$
	b. PENYUSUTAN ROTABLE
	1) Biaya penyusutan rotatable per tahun
	$\frac{\text{harga rotatable sparepart}}{\text{masa pakai}}$
	masa pakai : 10 tahun
	harga rotatable sparepart berdasarkan harga perolehan
	<i>Apabila tidak tercatat harga perolehan, harga rotatable sparepart</i>
	<i>diasumsikan 10 % s/d 15 % dari harga pesawat a. 1) atau a. 3)</i>
	2) biaya penyusutan rotatable per jam-km
	$\frac{\text{biaya penyusutan rotatable per tahun}}{\text{produksi pnp-km per tahun}}$

c. PENYUSUTAN ENGINE (MESIN PESAWAT)

- 1) Jumlah mesin pesawat;
- 2) Harga mesin pesawat
Harga mesin pesawat berdasarkan harga perolehan X jumlah mesin
- 3) Umur ekonomis mesin
Umur ekonomis mesin pesawat = umur ekonomis pesawat
- 4) BIAAYA PENYUSUTAN MESIN PESAWAT PER JAM-KM
$$\frac{\text{harga mesin pesawat}}{\text{umur ekonomis} \times \text{produksi pnp-km per tahun}}$$

d. TOTAL BIAAYA PENYUSUTAN PER JAM-KM

Total a. 6) + b. 2) + c. 4)

1.b. BIAAYA SEWA PESAWAT

- a. Total biaya sewa per tahun
Harga sewa pesawat udara terdiri dari :
 - Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance
 - dsb.
- b. BIAAYA SEWA PER JAM-KM
$$\frac{\text{total biaya sewa per tahun}}{\text{produksi pnp-km per tahun}}$$

2. BIAAYA ASURANSI

- a. Total biaya asuransi per tahun
Berdasarkan atas Premi yang dikeluarkan, terdiri dari :
 - hull insurance (asuransi pesawat)
 - third party legal liability (tanggung jawab terhadap pihak ketiga)
 - crew, penumpang, bagasi, dan kargo
- b. BIAAYA ASURANSI PER JAM-KM
$$\frac{\text{total biaya asuransi per tahun}}{\text{produksi pnp-km tahun}}$$

3. BIAAYA GAJI TETAP CREW

- a. Komposisi crew per pesawat

- Pilot	orang
- Co Pilot	orang
- Flight Attendant	orang
<hr/>	
Jumlah	orang
- b. Biaya gaji crew per pesawat per Tahun

- Captain Pilot	
- Co Pilot	
- Flight Attendant	
<hr/>	
Jumlah	
- c. Biaya gaji crew per pesawat per Tahun.
(biaya gaji crew per pesawat per bulan X 12) X jumlah set crew per pesawat
- d. BIAAYA GAJI TETAP CREW PER JAM-KM
$$\frac{\text{biaya gaji crew per pesawat per tahun}}{\text{produksi pnp-km tahun}}$$

No.	KOMPONEN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA
	<p>4. BIAYA GAJI TETAP TEKNISI</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah teknisi per pesawat orang b. Biaya gaji teknisi per pesawat per bulan c. Biaya gaji Teknisi per pesawat per Tahun (biaya gaji teknisi per pesawat (<i>per bulan X 12</i>) X jumlah set tenaga teknisi per pesawat d. BIAYA GAJI TETAP TEKNISI PER JAM-KM <u>biaya gaji teknisi per pesawat per tahun</u> produksi pnp-km tahun <p>5. CREW TRAINING</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pilot b. Flight Attendant c. Tehnisi d. Biaya Training Per Jam <p>6. TOTAL BIAYA OPERASI LANGSUNG TETAP</p> <p><i>Total biaya : 1 + 2 + 3 + 4+5</i></p>
B	<p>BIAYA OPERASI LANGSUNG VARIABEL</p> <p>1. BIAYA PELUMASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemakaian pelumas per jam terbang - sebutkan berapa liter kebutuhan (<i>oil consumption</i>) per jam berdasarkan data teknis. b. Harga rata-rata Pelumas per liter (<i>jika lebih dari satu jenis Pelumas, maka digunakan harga tertimbang</i>) <i>harga jenis 1 + harga jenis 2 + + harga jenis ke N jumlah jenis pelumas (N)</i> c. BIAYA PELUMAS PER JAM-KM <u>a. X b. X jam terbang per tahun</u> prooduksi pnp-km tahun <p>2. BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemakaian Avtur/Avgas per jam terbang <i>sebutkan berapa liter kebutuhan avtur/avgas (fuel consumption) per jam berdasarkan data teknis</i> b. Harga rata-rata Avtur/Avgas per liter (<i>harga Avtur/Avgas yang ditetapkan Pemerintah</i>) c. BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK PER JAM-Km <u>a. X b. X jam terbang per tahun</u> produksi pnp-km tahun

No.	KOMPONEN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA												
	<p>3. BIAYA TUNJANGAN CREW</p> <p>a. Komposisi Crew pesawat:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">- Pilot</td> <td style="text-align: right;">orang</td> </tr> <tr> <td>- Co Pilot</td> <td style="text-align: right;">orang</td> </tr> <tr> <td>- Flight Attendant</td> <td style="text-align: right;">orang</td> </tr> <tr> <td>- Tehnisi</td> <td style="text-align: right;">orang</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">Jumlah</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">orang</td> </tr> </table> <p>b. Biaya tunjangan crew per tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Travel Allowance - Production Allowance - Hotel Accomodation - Airport Transportation - Stand by Allowance - Night Stop Allowance - Crew Meals <p style="text-align: right;">Jumlah</p> <p>c. BIAYA TUNJANGAN CREW PER JAM-KM</p> <p style="text-align: center;"><u>biaya tunjangan crew per tahun</u> produksi pnp-km tahun</p> <p>4. BIAYA OVERHAUL / PEMELIHARAAN</p> <p>a. Overhaul Engine (... unit) (untuk pesawat tersebut berapa unit engine yang digunakan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)TBO (Time Between Overhaul) (selang waktu overhaul engine dalam jam) 2)Biaya Overhaul Engine per TBO (...unit) <ul style="list-style-type: none"> - dalam US\$. - dalam rupiah 3)BIAYA OVERHAUL ENGINE PER JAM-KM <p style="text-align: center;"><u>Biaya overhaul TBO per tahun</u> produksi pnp-km per tahun</p> <p>b. Overhaul Propeller (.....unit) (untuk pesawat tersebut berapa unit propeller yang digunakan) catatan : khusus pesawat piston atau turbo jet</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) TBO (Time Between Overhaul) (selang waktu overhaul engine dalam jam) 2) Biaya Overhaul Propeller per TBO (...unit) <ul style="list-style-type: none"> - dalam US\$. - dalam rupiah 3) BIAYA OVERHAUL PROPELLER PER JAM <p style="text-align: center;"><u>Biaya overhaul TBO per tahun</u> produksi pnp-km per tahun</p> <p>c. Overhaul Airframe</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) TBO (Time Between Overhaul) (selang waktu overhaul airframe dalam jam) 2) Biaya Overhaul /airframe per TBO <ul style="list-style-type: none"> - dalam US\$. - dalam rupiah 	- Pilot	orang	- Co Pilot	orang	- Flight Attendant	orang	- Tehnisi	orang	Jumlah			orang
- Pilot	orang												
- Co Pilot	orang												
- Flight Attendant	orang												
- Tehnisi	orang												
Jumlah													
	orang												

No.	KOMPONEN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA
	<p>3) BIAYA OVERHAUL AIRFRAME PER JAM</p> <p style="text-align: center;"><u>biaya overhaul TBO per tahun</u> produksi pnp-km per tahun</p> <p>d. Pemeliharaan dan Pemakaian Suku Cadang Pesawat</p> <p>1) Biaya Pemeliharaan dan Pemakaian Suku Cadang per Tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalam US\$. - dalam rupiah <p>2) Biaya Pemeliharaan & Pemakaian Suku Cadang per Pesawat</p> <p>e. TOTAL BIAYA OVERHAUL / PEMELIHARAAN PER JAM -KM</p> <p>Untuk pesawat piston atau turbo jet = a.3) + b. 3) + c. 3)</p> <p>Untuk pesawat jet = a.3) + c.3)</p> <p>5. BIAYA JASA BANDAR UDARA</p> <p>a. Jasa Pendaratan</p> <p>1) Jumlah pendaratan per tahun</p> <p style="text-align: center;"><i>(jumlah pendaratan sesuai dengan jumlah frekwensi penerbangan per tahun)</i></p> <p>2) Biaya pendaratan per tahun</p> <p style="text-align: center;">(MTOW X tarif pendaratan per ton X jumlah pendaratan per tahun)</p> <p>3) BIAYA PENDARATAN PER JAM-KM</p> <p style="text-align: center;"><u>biaya pendaratan per tahun</u> produksi pnp-km per tahun</p> <p>b. Jasa Penempatan</p> <p>1) Jumlah penempatan pesawat per tahun</p> <p style="text-align: center;"><i>(jumlah penempatan pesawat sesuai dengan jumlah frekwensi penerbangan per tahun)</i></p> <p>2) Biaya jasa penempatan pesawat per tahun</p> <p style="text-align: center;">(MTOW X tarif jasa penempatan per ton X jumlah penempatan pesawat per tahun)</p> <p>3) BIAYA JASA PENEMAPANAN PESAWAT PER JAM-KM</p> <p style="text-align: center;"><u>biaya jasa penempatan pesawat per tahun</u> produksi pnp-km per tahun</p> <p>c. Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP)</p> <p>1) Jumlah route unit per tahun</p> <p>2) Biaya pelayanan penerbangan per tahun</p> <p>3) BIAYA JASA PELAYANAN PENERBANGAN (PJP) PER JAM-KM</p> <p style="text-align: center;"><u>Biaya Pelayanan Penerbangan per tahun</u> Jam Terbang per tahun</p> <p>c. TOTAL BIAYA JASA BANDARA PER JAM-KM</p> <p style="text-align: center;">a. 3) + b. 3) + c. 3)</p> <p>6. BIAYA JASA GROUND HANDLING PENERBANGAN</p> <p>a. Biaya Ground Handling per tahun,</p> <p style="text-align: center;"><i>(jumlah pendaratan per tahun X tarif ground handling)</i></p> <p>b. Biaya Jasa Ground Handling Lainnya per tahun</p> <p style="text-align: center;"><i>(jumlah pendaratan per tahun X tarif jasa ground handling lainnya)</i></p> <p>c. TOTAL BIAYA GROUND HANDLING PER JAM-KM</p> <p style="text-align: center;"><u>a, + b,</u> produksi pnp-km per tahun</p>

No.	KOMPONEN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA
	<p>7. BIAYA CATERING PENERBANGAN</p> <p>a. Biaya Catering per tahun Biaya catering yang digunakan untuk penerbangan (jumlah penumpang per pesawat per tahun X biaya catering per penumpang)</p> <p>b. TOTAL BIAYA CATERING PER JAM-KM $\frac{\text{biaya catering per tahun}}{\text{produksi prp-km per tahun}}$</p> <p>8. TOTAL BIAYA OPERASI LANGSUNG VARIABLE Total biaya : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7</p> <p>TOTAL BIAYA OPERASI LANGSUNG Total biaya : A + B</p>
II.	<p>BIAYA OPERASI TIDAK LANGSUNG</p> <p>1. BIAYA ORGANISASI</p> <p>a. Biaya pegawai non crew per tahun (biaya pegawai non crew untuk penerbangan per tahun)</p> <p>b. Biaya Umum per tahun (biaya umum penunjang aktivitas produksi untuk penerbangan per tahun)</p> <p>c. BIAYA ORGANISASI PER JAM-KM $\frac{a. + b.}{\text{produksi prp-km per tahun}}$</p> <p>2. BIAYA PEMASARAN/PENJUALAN</p> <p>a. Komisi Agen (komisi agen untuk penerbangan per tahun), yaitu : (jumlah penumpang per pesawat per tahun X tarif penumpang X ...% komisi agen)</p> <p>b. Dokumen Angkutan pembuatan dokumen angkutan untuk penerbangan per tahun (jumlah penumpang) per pesawat per tahun X biaya per dokumen)</p> <p>c. Reservation System reservation system untuk penerbangan per tahun, yaitu : (jumlah penumpang) per pesawat per tahun X biaya reservation system)</p> <p>d. Promotion & Advertising</p> <p>e. BIAYA PEMASARAN/PENJUALAN PER JAM-KM $\frac{a. + b.}{\text{produksi prp-km per tahun}}$</p> <p>TOTAL BIAYA OPERASI TIDAK LANGSUNG Total biaya = 1 + 2</p>

No.	KOMPONEN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA
III.	TOTAL BIAYA OPERASI PER JAM-KM Total biaya operasi langsung + Total biaya operasi tidak langsung

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAHJU AGRI HERPRIARSONO

